

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan

4.1.1. Tujuan

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan adalah terwujudnya kedaulatan pangan masyarakat melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal.

4.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Sasaran Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya koordinasi dalam perumusan kebijakan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan
2. Meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras)
3. Meningkatnya cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana
4. Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
5. Tertanganinya daerah rawan pangan
6. Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam
7. Meningkatnya keamanan pangan segar
8. Stabilitasnya harga pangan strategis

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan beserta indikator kinerjanya disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Urusan Pangan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	Mewujudkan kedaulatan pangan masyarakat melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan	Meningkatnya koordinasi dalam perumusan kebijakan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan	Jumlah regulasi kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan	1	1	1	1	1
2		Meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras)	Ketersediaan pangan utama (Ton Beras)	5.724.620	5.746.958	5.769.946	5.793.026	5.816.198
3		Meningkatnya cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana	Persentase penguatan cadangan pangan	75	80	90	95	100
4		Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	97	100	100	100	100
5		Tertanganinya daerah rawan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	55	60	60	60	60
6		Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan	90,75	91,13	91,5	86	87
7		Meningkatnya keamanan pangan segar	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80	80	80	80	80
8		Stabilnya harga pangan strategis.	Koefisien variasi pangan strategis (beras, cabe merah, bawang merah)	-	-	-	CV beras ≤ 5% CV cabai merah ≤ 35% CV bawang merah ≤ 30%	CV beras ≤ 5% CV cabai merah ≤ 35% CV bawang merah ≤ 30%

4.2. Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Penyelenggaraan urusan pangan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yaitu: 1). Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, 2). Penyelenggaraan ketahanan pangan, 3). Penanganan kerawanan pangan dan 4). Keamanan pangan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut:

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Tujuan 1	Sasaran 2	Strategi 3	Arah Kebijakan 4
Mewujudkan kedaulatan pangan masyarakat melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan	Meningkatnya koordinasi dalam perumusan kebijakan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan	Meningkatkan koordinasi penyusunan regulasi kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan dengan mengoptimalkan Dewan Ketahanan Pangan	Penyusunan Regulasi dan Pemantapan Kebijakan Dewan Ketahanan Pangan
	Meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras)	Meningkatkan ketersediaan pangan melalui koordinasi sinergi lintas sektor dalam penyediaan pangan	Peningkatan Ketersediaan, pengembangan sumberdaya dan infrastruktur pangan
	Meningkatnya cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana	Meningkatkan pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	Pengembangan cadangan pangan pemerintah Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
	Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	Meningkatkan ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	Pemantauan Pasokan dan Harga Pangan Strategis
	Tertanganinya daerah rawan pangan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kerawanan pangan melalui kemandirian pangan di desa.	Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat
	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal melalui pemanfaatan pekarangan	Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA

Tujuan 1	Sasaran 2	Strategi 3	Arah Kebijakan 4
		dan pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal	Pengembangan industri pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan
	Meningkatnya keamanan pangan segar	Meningkatkan kesadaran mutu dan keamanan produk pangan kepada pelaku usaha bidang pangan serta konsumen.	<p>Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan</p> <p>Pengembangan Sertifikasi dan Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Pangan Segar</p> <p>Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan</p>
	Stabilnya harga pangan strategis.	Meningkatkan sistem distribusi pangan untuk untuk mengembangkan akses pangan dan stabilisasi harga.	<p>Stabilisasi Harga Pangan Strategis</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Penguatan Akses Pangan</p>